



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 April 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : SETYO BUDIYANTO
- Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL
- NHK : 53471

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 7.600.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 310 m<sup>2</sup>/243 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 135 m<sup>2</sup>/156 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
- Tanah Seluas 2219 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 946.000.000

- LAINNYA, SEPEDA RB Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
- MOTOR, PIAGGIO VESPA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
- LAINNYA, TREK RB Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
- MOBIL, TOYOTA LX Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 360.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 705.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 9.611.000.000

**III. HUTANG** Rp. ---

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 9.611.000.000

## Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.